

Gotong Royong Sebagai Tindakan Kolektif: Studi Pada Beberapa SMP di Kota Denpasar

Anggoro Yudo Mahendro dan Ihya Ulumuddin

Peneliti di Anwar Muhammad Foundation (AMF) dan Peneliti di Pusat Penelitian dan Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud

Email: yudo@amf.or.id ; dan ihya_aden@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini menggunakan kerangka konsep tindakan kolektif (Abn dan Ostrom, 2008) untuk melihat gotong royong di sekolah menengah di Kota Denpasar. Melalui pendekatan tindakan kolekti, diketahui bahwa selain modal sosial (dasar kepercayaan, jaringan, dan institusi) gotong royong juga terkait dengan hubungan timbal balik antar actor. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, beberapa kepala sekolah, guru, siswa, dan informan di luar sekolah diwawancarai dalam pengumpulan data. Hasil penelitian ini yang melihat gotong royong sebagai tindakan kolektif dipicu oleh actor (trustee) yang memiliki modal sosial untuk mempengaruhi (entrust) truster. Namun, kesinambungan tindakan kolektif juga tergantung sejauh mana trustee konsisten untuk mengembangkan tindakan kolektif yang dipeloporinya.

Kata kunci: gotong royong

PENDAHULUAN

Gotong royong bagi sebagian besar masyarakat Indonesia akrab sekali dengan konsep ini baik dalam ranah budaya, sosial, maupun politik. Oleh karenanya, konsep ini dianggap sebagai *ideal type* untuk melihat solidaritas antar anggota masyarakat di Indonesia (lihat Bintarto, 1980; Bowen, 1986). Di sisi lain (Geertz 1963, dalam Newberry; 2013) menyatakan bahwa gotong royong pada masyarakat Jawa disebut sebagai *berbagi kemiskinan*. Lebih jauh,

Koentjaraningrat (1985) mendefinisikan gotong royong sebagai tolong menolong dalam komunitas kecil, bukan saja terdorong atas keinginan spontan untuk berbakti pada sesama, tetapi dasar tolong menolong adalah perasaan saling membutuhkan yang ada dalam jiwa masyarakat. Berdasarkan definisi tersebut diketahui bahwa gotong royong menurut Koentjaraningrat memiliki dua aspek, yaitu aspek nilai (*value*) dan praktek (*action*) yang saling terpaut.

Studi-studi tersebut tentunya memerlukan pembaharuan untuk melihat budaya gotong royong di Indonesia dengan kontes kekinian. Banyak penelitian yang mengkaji mengenai budaya gotong royong dalam ranah ilmu sosial, beberapa menekankan pada konsep *social capital* atau modal sosial (Syahra: 2003; Sihombing: 2005; Kusumastuti, 2015). Dalam dunia pendidikan khususnya pembelajaran di kelas, gotong royong juga kaitkan dengan *cooperative learning* atau belajar bersama (Novita; 2006). Dengan demikian diketahui bahwa kajian mengenai gotong royong dalam ranah ilmu sosial masih minim sekali, gotong royong lebih banyak dilihat dalam sisi nilai (*value*) semata. Belum banyak penelitian yang mengkaji gotong royong sebagai sebuah aksi (*action*).

Oleh karenanya, penelitian ini ingin mengkaji gotong royong dengan memadukan pendekatan nilai dan aksi. Dalam penelitian ini gotong royong akan dilihat dalam kerangka konseptual tindakan kolektif (*collective action*) yang dikembangkan oleh Ahn dan Ostrom (2008). Dengan pendekatan tindakan kolektif, gotong royong akan dilihat sebagai tindakan resiprokal antar anggota masyarakat. Diharapkan dengan penelitian ini akan menyumbangkan perspektif lain dalam ranah ilmu sosial dalam melihat gotong royong.

Studi ini akan fokus melihat gotong royong pada institusi pendidikan formal yaitu sekolah, khususnya di beberapa sekolah menengah pertama (SMP) di kota Denpasar. Dalam studi ini sekolah tidak hanya dilihat pada sisi kegiatan belajar mengajar semata, namun juga interaksi antar warga sekolah serta interaksi warga sekolah dengan elemen lain di luar sekolah yang berperan dalam membangun tindakan kolektif. Dengan demikian, studi ini juga menelusuri elemen lain diluar sekolah yang signifikan menentukan dalam pembangunan tindakan kolektif di sekolah. Bertumpu pada konsep tindakan kolektif (Ahn dan Ostrom, 2008) studi ini akan diarahkan untuk menjawab pertanyaan penelitian:

Bagaimana proses terbentuknya tindakan kolektif di sekolah? Apakah lebih ditentukan oleh budaya atau struktural (regulasi), atau yang lainnya?

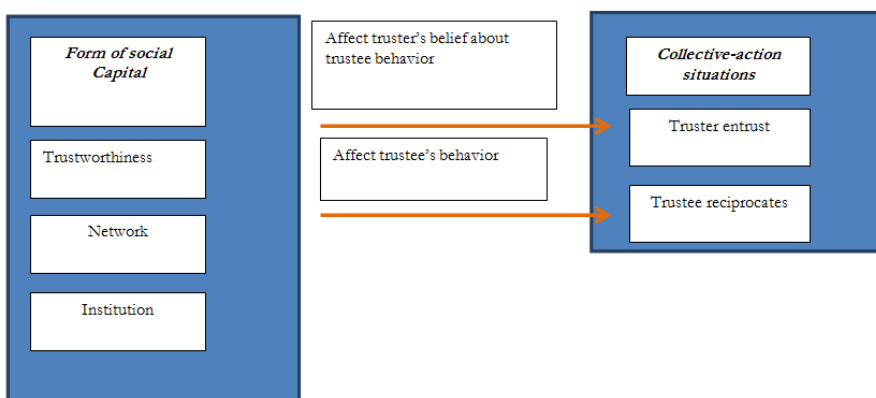
KAJIAN TEORITIK

Analisa Ahn dan Ostrom (2008) menjelaskan hubungan antara modal sosial dengan tindakan kolektif, tepat untuk membahas fenomena gotong royong secara lebih komprehensif. Hal ini dipahami karena menurut mereka tindakan sosial merupakan entitas yang tidak bisa dipisahkan dari ranah nilai. Ahn dan Ostrom menjelaskan bahwa tindakan kolektif dipengaruhi oleh modal sosial yang ada di masyarakat. Modal sosial dalam pandangan Ahn dan Ostrom terdiri dari kepercayaan (*trustworthiness*), jejaring sosial (*network*), dan institusi (*institution*). Sedangkan tindakan sosial terdiri dari dua bagian, seseorang yang percaya (*truster entrust*) dan hubungan timbal balik (*trustee reciprocates*).

Ahn dan Ostrom melakukan analisa tentang tindakan kolektif dengan membuat analisa situasional antara dua aktor. Hal ini dilakukan untuk memperjelas deskripsi mengenai situasi empirik yang kompleks. Aktor pertama ialah truster (orang yang akan mempercayakan) dan aktor yang kedua adalah trustee (orang yang menerima kepercayaan). Agar terjadi tindakan kolektif maka harus ada dua tahap aktifitas. Pertama, ialah truster mempercayai (*entrust*) trustee. Kedua ialah trustee melakukan tindakan timbal balik. Tindakan kolektif tidak akan tercipta jika truster tidak mempercayai trustee, dan trustee yang sudah diberi kepercayaan melakukan eksploitasi. Dengan demikian, maka terjadi hubungan yang timbal balik atas dasar saling percaya. Menurut Ahn dan Ostrom, ini bukanlah modal sosial namun tindakan kolektif, karena aktifitas saling mempercayai membutuhkan interaksi sosial dan terjadi dalam ruang publik.

Sedangkan modal sosial dimaknai oleh Ahn dan Ostrom dengan tiga unsur. Kepercayaan (*trustworthiness*) merupakan unsur yang menjadi referensi bagi trustee untuk menjadi terpercayai. Dalam terminologi modal sosial yang dikembangkan Fukuyama, kepercayaan ini dimaknai sebagai nilai-nilai (*values*) dan kebiasaan (*habbits*). Kedua, jaringan sosial (*network*) dimaknai sebagai

akumulasi tindakan kolektif. Trustee yang melakukan hubungan timbal balik tentunya tidak sulit untuk melakukan interaksi dengan truster, sedangkan trustee yang tidak melakukan timbal balik akan sulit tercipta tindakan kolektif. Dengan kata lain, jejaring sosial merupakan konektifitas antar aktor yang melakukan tindakan kolektif. Terakhir ialah, institusi yang dimaknai sebagai lembaga yang dapat menjadi sumber informasi sekaligus memberikan jaminan atas akibat yang dilakukan dalam setiap tindakan kolektif. Institusi ini dapat berbentuk institusi budaya, institusi hukum, institusi agama, dan lain-lain.



Gambar 1. Skema Hubungan antara Modal Sosial dan Tindakan Kolektif (Ahn dan Ostrom, 2008)

Dengan merujuk pada skema dalam gambar 1, diketahui bahwa tindakan kolektif dalam perspektif Ahn dan Ostrom, dalam hal ini yang kita sebut sebagai goyong royong sangat dipengaruhi oleh modal sosial. Selain itu, gotong royong jika dimaknai sebagai tindakan kolektif merupakan proses yang berulang dari hasil interaksi antar aktor dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, untuk mengetahui apakah gotong royong berjalan atau tidak dapat dilihat dari tiga elemen modal sosial tersebut. Kemudian yang tidak kalah penting, dalam tindakan kolektif, dapat dimaknai ada aktor yang aktif yang diberi kepercayaan untuk menciptakan gotong royong. Dalam hal ini aktor juga dapat dimaknai individual maupun kelompok, baik dari elemen masyarakat, pasar, maupun negara.

Dengan merujuk pada analisa Ahn dan Ostrom (2008) maka gotong royong sebagai tindakan kolektif dapat dilihat dalam dua level. Pertama, pada level modal sosial dan yang kedua pada level ekspresinya. Tentunya analisis transformasi harus dilakukan terlebih dahulu pada level modal sosialnya. Ahn dan Ostrom juga memberikan penjelasan bahwa modal sosial bukan merupakan sesuatu yang statis, melainkan dinamis. Secara operasional mengukur modal sosial dapat dilakukan dengan mengidentifikasi kepercayaan terhadap trustee (tokoh/aktor aktif), jaringan sosial dan institusi.

Berikutnya, setelah diidentifikasi modal sosial yang dimiliki oleh suatu masyarakat maka akan muncul tindakan kolektif. Ekspresi gotong royong atau tindakan kolektif tentunya disesuaikan dengan perubahan-perubahan sosial yang ada. Sangat mungkin dalam konteks kekinian banyak institusi-institusi “lama” yang tidak lagi dipercaya oleh kebanyakan masyarakat, sehingga eksperisi gotong royong lebih banyak diarahkan kepada aktor-aktor baru, institusi baru, dan juga dengan cara yang baru.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif. Menurut Cresswell (2007), penelitian kualitatif memiliki logika induktif. Dalam arti, penelitian ini dikerjakan dengan data-data yang partikular yang dijelaskan secara mendetail untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai permasalahan yang dibahas. Sehingga, walaupun penelitian ini memiliki asumsi-asumsi, namun tidak menjadi panduan yang kaku. Karena penelitian kualitatif bersifat siklus, jika tidak sesuai dengan data, asumsi atau konsep tersebut dapat diubah.

Penelitian ini dilakukan di 6 (enam) SMP negeri di kota Denpasar, yaitu SMP N 1 Denpasar, SMP N 3 Denpasar, SMP N 6 Denpasar, SMP N 8 Denpasar, SMP N 10 Denpasar, dan SMP N 12 Denpasar. . Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dengan siswa dan guru, serta FGD dengan guru. Dalam upaya triangulasi data, ada beberapa informan di luar sekolah yang juga diwawancarai. Penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 2 bulan, mulai pertengahan Juli hingga awal September 2015.

MAKNA GOTONG ROYONG BAGI MASYARAKAT BALI

Sampai saat ini budaya gotong royong masih menjadi hal yang lazim bagi masyarakat Bali, sekalipun di perkotaan seperti Denpasar. Geertz dan Geertz (1975) dalam *“Kinship in Bali”* menjelaskan bahwa masyarakat Bali terbangun dari komunitas klan yang disebut “dadia”. Dadia merupakan system kekerabatan yang terbangun atas keturunan laki-laki. Dadia memiliki fungsi privat maupun publik. Dalam urusan privat, dadia membangun budaya gotong royong untuk berbagai ritual siklus hidup, seperti ritual ngaben (kremasi). Di sisi lain, dalam ranah privat, setiap dadia juga memiliki pure tersendiri yang difungsikan untuk menghormati leluhur dadianya. Kemudian, fungsi publik, dadia ialah dalam memilih kepala desa adat, perwakilan dadia lah yang memilihnya. Dalam ranah publik, ada juga organisasi ketetanggaaan di bawah desa adat yang disebut “banjar”, dimana fungsi sosialnya mendukung upaya pemeliharaan lingkungan dan juga mendukung ritual adat dan agama (Pringle; 2004). Dengan demikian, Orang Bali tidak akan terlepas dari budaya gotong royong baik di internal keluarga maupun di dalam desa adat.

Dalam mendefinisikan gotong royong, ada beberapa narasumber yang mengaitkan konsepnya dengan konsep lokal. Setidaknya, ada tiga konsep yang mengemuka yaitu; *ngayah*, *ngayah bareng*, dan *menyama braya*. *Ngayah*, merupakan konsep yang lazim di kalangan Hindu Bali; kegiatan kerja bersama di tingkat Banjar dan Desa Adat untuk kegiatan keagamaan. Definisi *ngayah* menurut Nyoman Ardana (guru SMP N 1 Denpasar) ialah “pekerjaan yang digarap bersama dalam penggarapan, hal itu seringkali tidak menginginkan bayaran atau honor”. Definisi ini sejalan dengan pendapat (Wati; 2008) yang menjelaskan *ngayah* sebagai perwujudan rasa bakti ke hadapan Sang Pencipta, dalam bentuk aktifitas yang beragam, seperti menari, menyusun bunga dan janur, menyiapkan sesajen, memasak, dan sebagainya dalam upacara keagamaan yang dilaksanakan di Pura.

Geertz dan Geertz (1975) juga menjelaskan istilah *pemaksan*, sebagai konsep gotong royong yang mirip dengan konsep *ngayah*. *Pemaksan*, ialah kerja bakti (*obligatory work*) di level desa adat untuk membangun atau memperbaiki Pure (*temple*). Hal ini dipahami karena pure memainkan peran penting bagi

masyarakat Bali terutama terkait dengan kepercayaan atas dewa-dewa dan leluhur yang membutuhkan berbagai ritual dan upacara. Selain motif spiritual, desa adat juga memiliki peran kontrol sosial yang cukup kuat, sehingga individu akan terlibat secara aktif dalam gotong royong pada berbagai kegiatan keagamaan.

Pendapat lain mengatakan bahwa *ngayah* tidak dapat dipersamakan dengan gotong royong. Hal ini dipahami karena, istilah *ngayah* memiliki sifat memaksa. Oleh karenanya, Wayan Sumiara (guru SMP N 3 Denpasar) mengatakan bahwa konsep gotong royong lebih tepat menggunakan istilah “ngayah bareng”. *Ngayah bareng*, menurutnya lebih menekankan kesukarelaan dari para pesertanya dan tidak berkaitan dengan hal-hal yang sakral. Di sisi lain, Indriani (Guru SMP N 12 Denpasar) lebih setuju gotong royong disamakan dengan istilah “menyeme braye” yang dalam Bahasa Indonesia memiliki arti menyeme ialah saudara, braye ialah kerabat. Secara istilah diartikan keterlibatan keluarga atau kerabat dalam mendukung kegiatan “mesukaduka” (ritual alur hidup), seperti kematian, kelahiran, potong gigi, pernikahan, dan lainnya. Hal ini dipahami karena bagi masyarakat Bali, setiap siklus hidup tersebut memerlukan upacara yang agar terselenggaranya kegiatan tersebut membutuhkan dukungan dana, tenaga, dan juga bahan-bahan pokok. Selain itu, konsep gotong royong itu sendiri sudah dianggap menjadi bahasa lokal, yang menekankan pada kerja bersama, demi satu tujuan yang baik, serta dilakukan secara sukarela oleh orang-orang yang terlibat.

BENTUK-BENTUK GOTONG ROYONG DI SEKOLAH

Meighan (1981) pernah menjelaskan bahwa ada hubungan fungsional antara kurikulum, sekolah, dan masyarakat. Hal ini membantu untuk melihat bagaimana penanaman dan implementasi budaya gotong royong pada satuan pendidikan di Bali. Penelitian ini dilakukan pada 6 (enam) SMP negeri di Kota Denpasar. Diketahui bahwa bentuk implementasi gotong royong pada sekolah di Denpasar dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga); gotong royong dalam kegiatan keagamaan; gotong royong dalam *mesukaduka* dan bakti sosial; serta gotong royong dalam kegiatan ekstrakuler.

1. Gotong Royong dalam Kegiatan Keagamaan

Ada beberapa kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh sekolah, salah satunya ialah peringatan hari Saraswati. Hari Saraswati ialah peringatan hari pendidikan menurut agama Hindu. Semua satuan pendidikan di Kota Denpasar ikut merayakannya. Ada banyak kegiatan dalam perayaan ini, selain upacara keagamaan, sekolah biasanya juga menyelenggarakan berbagai lomba-lomba ditingkat kelas dan individu. Karena perayaan hari Saraswati menjadi peringatan yang dilaksanakan oleh semua sekolah di Bali. Hampir semua warga sekolah terlibat mulai dari persiapan hingga pelaksanaan termasuk yang beragama non Hindu. Mengenai hal ini, Wayan Wardana (guru SMP N 1 Denpasar) mengatakan:

Saraswati, hari pendidikan kalau di Hindu, setiap 6 bulan sekali, sesuai kalender Bali. Peringatan dalam bentuk upacara keagamaan, ada sarana (banten sesaji), ada menghias, ada lomba-lomba. Sarana ada yang tidak mampu kita buat sendiri, kita buat pejor. Sebagian besar kita beli, di sana ada dana punia (sumbangan uang) yang melibatkan guru dan siswa, nominalnya sukarela... Lomba pakaian ke pure, banyak juga yang ikut dari non hindu, termasuk ada lomba menata sesaji, punia juga mereka ikut menyumbang". (Wawancara 9 Agustus 2016)

Diketahui dalam berbagai kegiatan keagamaan para siswa bersama-sama dengan guru mempersiapkan semua kelengkapan upacara secara swadaya. Beberapa kelengkapan upacara yang bisa dibuat sendiri seperti penjor, banten, dan lainnya dibuat bersama-sama. Sedangkan perlengkapan lainnya yang sulit dibuat, dibeli dengan uang dari hasil pengumpulan uang secara kolektif oleh guru dan siswa. Selain peringatan hari Saraswati, ada beberapa kegiatan keagamaan lain yang dilaksanakan di sekolah, seperti upacara galungan dan kuningan. Kemudian, pada saat menjelang Ujian Nasional (UN) siswa juga bergotong royong untuk melakukan doa bersama. Dalam semua kegiatan, guru dan siswa sama-sama bergotong-royong bahkan tak jarang orang tua siswa juga terlibat untuk membantu.

2. Gotong Royong dalam Kegiatan *Mesukaduka* dan Bakti Sosial

Dalam penelitian ini konsep *mesukaduka* cukup populer di kalangan narasumber, guru dan siswa SMP di Denpasar. *Mesukaduka* memiliki arti suka duka dalam Bahasa Indonesia, yang secara istilah artinya kebersamaan dalam suka/kesenangan dan duka/kemalangan. Berbagi dalam suka dan duka ialah hal yang umum bagi masyarakat Indonesia, bedanya bagi masyarakat Bali, mereka menghimpun diri menjadi sebuah lembaga *microfinance* yang dikelola profesional. Setiap sekolah yang menjadi subjek penelitian ditemui organisasi *mesukaduka* yang dikelola oleh guru-guru. Berikut ini penjelasan mengenai pengorganisasian *mesukaduka* menurut I Nyoman Winastra (Guru SMP 12 Denpasar):

Ada aturannya mirip koperasi. kalau meninggal kita akan memberikan kain putih, dupa, dan kebutuhan lainnya, kalau barang dikelola... Suka duka itu iuran yang digunakan untuk kematian, pernikahan, potong gigi, dll. Iurannya, 15.000 per bulan dipotong setiap gaji. Kalo meninggal kita berikan 550.000, uang itu yang resmi, yang pribadi pasti ada juga, kalau sakit itu 450.000". (Wawancara 10 Agustus 2016)

Struktur pengurus organisasi *mesukaduka* biasanya tidak terlalu kompleks, hanya terdiri dari ketua dan bendahara. Setiap anggota menyalurkan uangnya setelah mereka menerima gaji pada setiap bulannya yang bersifat sukarela. *Mesukaduka* menurut I Made Purna (FGD, 2016) dari BPNB Bali ialah bentuk kesetaraan masyarakat Bali, dalam kondisi suka ataupun duka harus ditanggung bersama. Selain itu, *mesukaduka* juga mengadaptasi pola kebersamaan di tingkat Banjar dan Desa Adat. Oleh karenanya, saat diadopsi di lingkungan kerja, khususnya sekolah para guru sudah terbiasa melakukannya.

Jika pada kelompok guru sudah terbentuk organisasi yang mapan untuk kegiatan *mesukaduka*, pada kelompok siswa dilakukan secara kondisional, khususnya hanya pada kasus kemalangan saja. Pengurus OSIS ataupun perangkat kelas sudah terbiasa untuk menghimpun dana dari teman-teman mereka, salah satunya jika ada diantara mereka yang mengalami kemalangan. Penanganan *mesukaduka* pada kelompok siswa memiliki aturan tidak tertulis,

mereka sudah mengetahui kapan penghimpunan dana dilakukan di tingkat kelas saja, serta kapan harus dilakukan di tingkat sekolah. Keputusan itu disandarkan kepada seberapa besar kemalangan yang menimpa siswa yang sedang terkena musibah.

Sekolah-sekolah yang menjadi subjek penelitian juga melakukan kegiatan bakti sosial untuk warga yang kurang mampu. Selain kegiatan kondisional seperti saat terjadi bencana besar, ada juga kegiatan bakti sosial yang diselenggarakan secara rutin. Menurut narasumber, diketahui ada dua kegiatan yang dilakukan oleh sekolah yang didalamnya ada bakti sosial ialah saat penerimaan siswa baru dan juga pada saat perayaan hari jadi sekolah. Mengenai kegiatan bakti sosial, I Wayan Sumiara guru SMP N 3 Denpasar mengatakan;

Ke panti jompo, mengumpulkan baju bekas makanan ringan, pada saat ulang tahun SMP. Pernah sampai dengan desa tertinggal di Karang Asem, ada 10 orang perwakilan siswa yang kita ajak ke sana. Kita melibatkan siswa, komite, dan juga guru. Yang dikumpulkan, beras, mie instan, buku, ATK, pakaian bekas, tidak pakai uang tunai. Diberikan kepada siswa yang kurang mampu”. (Wawancara 9 Agustus 2016)

Para guru yang menjadi narasumber menyepakati bahwa kegiatan bakti sosial yang melibatkan siswa merupakan kegiatan yang penting. Sekolah sebagai sarana pendidikan formal juga perlu untuk menumbuhkan empati siswa dengan berbagai kegiatan sosial dengan melakukan berbagai kegiatan bakti sosial. Masa orientasi siswa (MOS) yang sudah berubah menjadi masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) berdasarkan Permendikbud No. 18 tahun 2016, sejak lama pada sekolah-sekolah di Denpasar diarahkan untuk melakukan bakti sosial. Bakti sosial dilakukan dengan mengumpulkan barang-barang bekas yang masih dapat digunakan oleh para siswa baru yang akan disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan seperti di panti asuhan. Beberapa sekolah juga melakukan kegiatan bakti sosial dengan cara melakukan pembagian kebutuhan bahan pokok kepada desa-desa yang ada di sekitar sekolah, seperti yang dilakukan oleh SMP N 12 Denpasar yang lokasinya berada dipinggiran Kota Denpasar.

3. Gotong royong dalam kegiatan ekstrakurikuler siswa

Siswa SMP di Denpasar didorong untuk terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler. Dorongan itu ada yang dari tingkat nasional sampai ke level daerah. Di tingkat pusat melalui kurikulum 2013 menekankan agar kegiatan pramuka diwajibkan pada semua sekolah di Indonesia. Mengenai pelaksanaan Pramuka, Wayan Ardana Guru SMP N 1 Denpasar mengatakan “Pramuka wajib bagi kelas 7, untuk pelaksanaannya kita bekerjasama dengan polisi. Semenjak K 13, pramuka sebagai ekstra yang wajib, sebelumnya pramuka hanyalah kegiatan ekstra yang sukarela. Materi kepramukannya dilanjutkan lagi ketika jeda semester”. Sekolah-sekolah lain juga menerapkan kegiatan pramuka, di SMP N 3 Denpasar masih rutin diselenggarakan kemah, sebelumnya menyelenggarakan kegiatan pramuka di Bedugul.

Selain itu, ada beberapa program kemendikbud yang diterapkan di sekolah, yaitu UKS (unit kesehatan sekolah) dan Adiwiyata. UKS merupakan program di sekolah yang bekerja sama dengan kementerian kesehatan. Ni Wayan Purnasih guru SMP N 10 Denpasar mengatakan bahwa program UKS dikelola oleh PMR (palang merah remaja). Programnya antara lain ialah sekolah sehat, yaitu program pemeriksaan kesehatan siswa oleh petugas kesehatan dari Puskesmas setempat kepada para siswa di sekolah.

Sedangkan Adiwiyata merupakan program yang didorong oleh kementerian lingkungan hidup yang menekankan pendidikan lingkungan hidup berkelanjutan bagi siswa. SMP N 1 Denpasar merupakan salah satu sekolah dengan predikat adiwiyata mandiri. Predikat tersebut diberikan kepada sekolah yang sudah memiliki mekanisme pengelolaan lingkungan sekolah secara profesional dan berkelanjutan. Selain itu, sekolah adiwiyata mandiri juga memiliki kewajiban untuk menularkan system sekolahnya yang berbasis lingkungan kepada sekolah-sekolah lainnya. Walaupun belum mendapatkan predikat sekolah adiwiyata, SMP N 12 Denpasar dan SMP N 3 Denpasar juga memiliki system pengelolaan yang tidak kalah baiknya. Salah satu program yang mengemuka ialah pengurangan sampah non organik serta pemilihan sampah.

Kemudian pada tingkat pemerintah Kota Denpasar juga menghimbau sekolah untuk menyelenggarakan beberapa

program. Walikota Denpasar yang saat ini dijabat oleh Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra menghimbau agar sekolah-sekolah menerapkan olah raga yoga. Dalam sebuah portal resmi Ia mengatakan akan menetapkan yoga sebagai olah raga yang diwajibkan dari mulai tingkat SD-SMA (Setda, 2014). Mendukung hal tersebut, pihak Dinas Pendidikan mengatakan bahwa yoga bukan sekedar olah fisik, namun juga oleh mental yang sangat baik untuk pendidikan anak.

Selain itu, masih banyak ekstrakurikuler yang dikembangkan oleh sekolah. Rata-rata setiap sekolah yang ditemui memiliki 20-30 jenis ekstrakurikuler, diluar OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah). Kegiatan ekstrakurikuler cukup beragam, mulai dari seni-budaya, olah raga, serta minat bakat terhadap mata pelajaran tertentu. Diketahui, SMP-SMP di Bali cukup menjunjung tinggi seni budaya, bahkan setiap sekolah memiliki tari tersendiri yang biasa dipentaskan pada hari jadi sekolah. Lebih jauh, kepala sekolah SMP N 10 Denpasar mendukung studi banding siswanya yang tergabung dalam ekstrakurikuler tari dan gamelan Bali, untuk menggali ilmu dan berkolaborasi dengan seniman lain di luar Bali. Contohnya Tahun 2015 lalu, SMP N 10 Denpasar melakukan kolaborasi dengan ISI Yogyakarta dalam sebuah pertunjukan di kompleks Candi Perambanan Jawa Tengah.

INSTITUSI PENDORONG GOTONG ROYONG

Dari penjelasan sebelumnya diketahui bahwa begitu banyak institusi yang menjadi bentuk modal sosial pada sekolah-sekolah di Bali. Setidaknya, ada dua institusi penting yang mendorong terciptanya gotong royong pada sekolah sekolah di Denpasar; institusi adat-agama serta institusi pemerintahan baik pusat maupun daerah. Institusi di sini dijelaskan sebagai elemen dari modal sosial dalam kerangka konsep tindakan kolektif (Ahn and Ostrom, 2008). Olehkarenanya, dalam membahas institusi secara simultan juga membahas jejaring (network) sekaligus dasar kepercayaan (trustworthiness) yang menjadi satu bagian dari modal sosial. Berikut ini akan dijelaskan lebih jauh mengenai peran dua institusi tersebut dalam mendorong gotong royong di Sekolah.

I Made Purna mantan ketua BPNB Bali dalam FGD

mengatakan “*saya bisa pastikan selama masih ada agama Hindu di Bali, maka gotong royong akan tetap ada*”. Pernyataan itu tidak berlebihan jika kita kembali merujuk penelitian-penelitian klasik dan terbaru mengenai masyarakat Bali. Agama Hindu Bali sebagaimana kajian Howe (2005) meskipun ada perubahan sudut pandang melihat agama dan adat, namun ritual bersama dalam system banjar dan desa adat tidak mungkin bergeser. Hal ini dipahami karena dalam berbagai ritual keagamaan dan adat Hindu Bali (Parisada Hindu Darma Indonesia) menitikberatkan kepada keterlibaran *pedanda* (pendeta) dan masyarakat luas.

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bagaimana ngayah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan Orang Bali. Pada ranah keluarga masyarakat Bali sudah terikat dengan *dadia*, kemudian pada lingkup tempat tinggal terikat dengan Banjar dan Desa Adat, hal ini menandakan bahwa sejak dini anak-anak Bali sudah tersosialisasi dengan baik mengenai budaya gotong royong. Pada level Banjar dan Desa Adat biasanya terbentuk “*Sakka Teruna Teruni*” organisasi kepemudaan yang memiliki tugas dalam setiap kegiatan keagamaan maupun adat. Beberapa siswa yang mejadi narasumber mengatakan bahwa mereka sudah terlibat dalam organisasi tersebut. Pengetahuan-pengetahuan dasar dalam ritual keagamaan pun mereka dapatkan dalam Sakka Teruna Teruni, terutama dalam mempersiapkan perlengkapan upacara. Dengan demikian diketahui bahwa gotong royong dalam kehidupan keagamaan dan adat bagi masyarakat Bali akan terus lestari karena bagian dari doktrin agama. Sehingga, sedikit banyak akan berdampak kepada kelangsungan budaya gotong royong dalam kehidupan keseharian.

Sedangkan pada sisi institusi pemerintahan mendorong gotong royong melalui kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya mengenai penerapan kurikulum 2013 di Kota Denpasar, hal ini sedikit banyak memberikan ruang yang besar bagi penanaman nilai dan implementasi gotong royong. Kurikulum 2013 setidaknya mampu mengubah metode kegiatan belajar mengajar di kelas dengan menekankan kepada aspek ketuhanan dan dimensi sosial. Mengenai hal ini, Ni Putu Hapsari siswa SMP N 10 Denpasar mengatakan “dengan K 13 (kurikulum 2013) ini kita diminta aktif, dan ada tambahan poin bagi yang aktif di kelas. Jadi kita banyak membahas materi bersama-

sama nanti kalau kurang gurunya menambahkan”. Metode yang partisipatif mulai banyak dikembangkan di sekolah, beberapa guru juga menyatakan kini mulai mengembangkan metode teman sebaya (*peer group*) dan juga metode pembelajaran kooperatif (*cooperative learning*).

Selain itu, kurikulum 2013 juga mewajibkan pramuka ditingkat pendidikan dasar, termasuk SMP. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, diketahui bahwa kelas 7 diwajibkan untuk mengikuti pramuka. Kegiatan pramuka tentunya akan banyak mendorong siswa untuk berinteraksi dengan sesama siswa serta menjadi katalisator untuk penanaman nilai-nilai gotong royong. Wajibnya kegiatan pramuka bagi siswa akan menguatkan pemahaman guru dan siswa bahwa aktifitas di sekolah bukan hanya kegiatan akademis-kognitif semata.

Dalam kurikulum 2013, guru juga memiliki indikator penilaian siswa yang lebih komprehensif. Penilaian bukan hanya sebatas pada mata pelajaran yang diajarkan, namun juga terkait nilai kepramukaan, serta yang lebih penting sikap siswa secara umum. Salah satunya ialah piket kelas yang menjadi kewajiban bagi siswa, sehingga jika ada siswa yang tidak mau piket akan mendapatkan sanksi yang akan mempengaruhi penilaian siswa tersebut. Dengan demikian, sesungguhnya penerapan kurikulum 2013 memiliki dampak yang signifikan dalam penanaman dan implementasi budaya gotong royong di sekolah baik melalui ruang kelas maupun di luar ruang kelas.

Selain ekstrakurikuler wajib seperti Pramuka, sekolah yang menjadi subjek penelitian memiliki banyak sekali ekstrakurikuler. Sebagaimana yang sudah disinggung di atas, ekstrakurikuler ini memiliki banyak bidang seperti; olah raga, kesenian, dan juga pengembangan mata pelajaran. Jumlahnya pun cukup banyak berkisar antara 20-30 ekstrakurikuler di tingkat sekolah. Dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler ini juga akan menambah jejaring siswa dengan teman-temannya di sekolah maupun di luar sekolah. Seperti kegiatan olah raga misalnya, siswa yang aktif biasanya akan bertemu dalam kegiatan kompetisi ataupun perkumpulan club, begitu pun yang beraktifitas dalam kegiatan kesenian.

Kemudian yang tidak kalah penting ialah para pengajar dalam kegiatan ekstrakurikuler ini sebagian besar ialah elemen di luar sekolah. Seperti kegiatan PMR dalam UKS yang bekerja sama

dengan puskesmas, kemudian Pramuka yang juga bekerja sama dengan kepolisian, dan masih banyak lagi kelompok profesional dan alumni yang terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Hal ini tentunya mendorong masyarakat luas untuk berpartisipasi bersama untuk memajukan pendidikan di sekolah dengan bergotongroyong.

BANK SAMPAH: SEBUAH PRAKTIK BAIK TINDAKAN KOLEKTIF DI SEKOLAH

Dari penjelasan sebelumnya diketahui bahwa intitusi adat-agama serta institusi pemerintahan menjadi pendorong gotong royong di sekolah. Namun, perlu diketahui bahwa sekolah sebagai intitusi tertutup yang memiliki relasi kuasa yang tidak seimbang. Dalam hal ini guru dan kepala sekolah tentunya memiliki otoritas yang lebih untuk memaksa siswa untuk patuh terhadap setiap kebijakan apapun yang diberikan oleh mereka, seperti terlibat dalam setiap bentuk-bentuk gotong royong yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Dalam konsep tindakan kolektif Ahn dan Ostrom (2008) dijelaskan tindakan kolektif terjadi pada dua level, *truster* mempercayai *trustee*, dan *trustee* melakukan tindakan resiprokal. Dalam penejelasan sebelumnya dikaji bagaimana sekolah sebagai trustee mampu mendorong tindakan kolektif dengan modal sosial yang bersandar pada insitusi adat-agama dan juga institusi pemerintah. Oleh karenanya, dalam penjelasan berikut ini akan dijelaskan contoh yang lebih spesifik mengenai Bank Sampah yang tidak terkait dengan institusi agama-adat serta institusi pemerintah pusat dan daerah.



Gambar 2. Para Siswa SMP N 3 Denpasar memilah sampah plastik
(Sumber: Dokumentasi Puslitjakdikbud)

Dari enam sekolah yang menjadi subjek penelitian, hanya SMP N 3 Denpasar yang bank sampahnya berjalan dengan baik. Selain itu, berdasarkan observasi juga diketahui bahwa sekolah sangat fokus untuk menanamkan pendidikan lingkungan hidup. Hal ini terlihat dari pembedaan tong sampah antara sampah-organik dan non organik dan penggunaannya yang sesuai serta minimalisasi penggunaan plastik dan *Styrofoam* di kantin. Hampir semua pedagang di kantin, menggunakan piring dan gelas yang dapat digunakan kembali, piring dari rotan yang dilapisi daun pisang. Berdasarkan pengamatan, massifnya pelaksanaan pendidikan berwawasan lingkungan hidup di SMP N 3 Denpasar lebih baik dibandingkan dengan SMP lain yang memiliki status adiwiyata mandiri yang juga menjadi subjek penelitian. Tentunya ini kembali perlu digarisbawahi, bahwa dorongan struktural atau institusi pemerintahan melalui penilaian sekolah adiwiyata oleh pemerintah ternyata tidak sepenuhnya objektif.

Bank sampah merupakan salah satu ekstrakurikuler yang digerakan oleh siswa untuk menjual sampah, khususnya sampah plastik. Dengan demikian, kegiatan utama siswa adalah mengumpulkan dan memilah sampah plastik. Mengenai proses pengelolaan bank sampah di SMP N 3 Denpasar, Putu Mega Darma Putra yang merupakan Ketua OSIS mengatakan:

Pertama, bapak kepala sekolah merencanakan adanya bank sampah, kemudian dibuat dan diresmikan. Kemudian, ada program setiap kelas harus ada tabungan di bank sampah. Kita membantu mengumpulkan sampah di kelasnya masing-masing. Nyetornya setiap hari, pilah-pilihnya seminggu sekali. ada namanya pengepul restu alam kita setornya ke sana. Kadang-kadang setor itu dua sampai tiga hari sekali, atau kalo penuh dalam sehari, kita setor kesana. Kita kerja sama dengan pengepul restu alam, nanti ditimbang, ini dari kelas 9 sampahnya, kalo ini dari kelas 7, dan sebagainya.” (wawancara 8 Agustus 2016)

Aktifnya bank sampah di SMP N 3 Denpasar ternyata terkait dengan wawasan tentang lingkungan. Sekolah-sekolah di Denpasar cukup akrab dengan PPLH (Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup), lembaga yang sejak 1997 fokus untuk melakukan pendidikan lingkungan hidup di Bali. Salah satu programnya ialah memasukan pendidikan lingkungan hidup di sekolah, baik melalui pendidikan di dalam kelas maupun di luar kelas. Catur Yudha Hariyani, yang merupakan ketua dari PPLH mengomentari aktifnya bank sampah di SMP N 3 Denpasar sebagai berikut:

Kalau di SMP yah naik turun, karena ada pro kontra antara orang tua dan pihak sekolah. Karena pernah membawa, orang tuanya protes. Kenapa mesti anak-anak bawa dari rumah, bahwasanya anak saya kan bukan pemulung. Itu yang membuat kepala sekolah mandeg dalam kegiatannya. Tetapi memang itu semuanya ada pada kekuatan kepala sekolah, kalau kata kepala sekolah lanjut, yah lanjut, tapi kalau kata kepala sekolah gak lanjut, yah gak lanjut. Contoh misalnya di SMP 3, SMP 3 itu sebetulnya dulu guru di sana, mengikuti proses, mulai dari pendidikan MOS. Lama kami mengikuti proses itu sampai kepala sekolah ganti, dan diganti sekarang yang naik. Karena kepala sekolah yang baru mempunyai pengetahuan yang tinggi tentang lingkungan, maka diwujudkanlah ketika beliau menjadi kepala sekolah.” (Wawancara 12 Agustus 2016)

Dengan demikian diketahui bahwa keberadaan bank sampah merupakan inisiatif dari kepala sekolah SMP N 3 Denpasar. Tanpa ada dorongan dari institusi adat-agama ataupun pemerintah pusat maupun daerah kegiatan ini tetap dilangsungkan. Dari penjelasan di atas pemberlakuan bank sampah di sekolah bukan tanpa hambatan. Bagi orang tua yang tinggal di perkotaan tentunya tidak nyaman bila anaknya harus membawa sampah setiap harinya. Namun, karena konsistensi kepala sekolah program bank sampah dapat terus berjalan. Hal ini sejalan dengan situs resmi sekolah yang mencantumkan pendidikan lingkungan hidup menjadi bagian dari visi sekolah “Berprestasi Taraf Internasional, Berbudaya Lingkungan, dan Berakhlak Mulia”.

Kepala Sekolah, secara individu, dan SMP N 3 Denpasar sebagai lembaga memainkan peran *trustee* dalam skema tindakan kolektif Bank Sampah. Sebagai kepala sekolah yang memiliki otoritas (modal sosial) untuk menentukan kebijakan ditingkat sekolah. Pihak-pihak lain yang terlibat khususnya siswa dan orang tua siswa juga mempercayai (*entrust*) sekolah yang menanamkan budaya lingkungan. Dengan demikian, sekolah dapat bertindak lebih jauh (*trustee reciprocates*) dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait seperti PPLH dan Bank Sampah Restu Alam untuk mendukung agar bank sampah berjalan secara berkesinambungan.

KESIMPULAN

Dengan demikian diketahui bahwa dengan penelitian ini gotong royong dapat dijelaskan dengan menggunakan kerangka konsep tindakan kolektif. Gotong royong, tidak hanya dapat dikaji pada ranah modal sosial, namun juga aksinya. Dalam Konsep tindakan kolektif melihat modal sosial sebagai latar belakang untuk *trustee* melakukan tindakan kolektif dan sebagai referensi yang mempengaruhi *truster* untuk mempercayai *trustee*. Dengan demikian, konsep tindakan kolektif juga melihat modal sosial sebagai aspek relasi kuasa. Hal ini dipahami karena Anh dan Ostrom (2008) menggunakan kata *trustworthiness* bukan *trust*, sebagai elemen modal sosial.

Selain itu, melihat gotong royong sebagai tindakan kolektif memiliki kelebihan untuk melihat sejauh mana tindakan

kolektif tersebut akan berkesinambungan. Dari penelitian ini diketahui bahwa institusi pemerintahan baik pusat maupun daerah dapat mendorong terciptanya gotong royong di sekolah. Namun, sayangnya setiap kebijakan yang dilangsungkan tidak konsisten. Contohnya ialah pemberlakuan kurikulum 2013 yang menurut informan cukup signifikan mendorong budaya gotong royong di sekolah dengan pembelajaran kooperatif dan keaktifan siswa dalam Pramuka ternyata kini tidak lagi diberlakukan secara nasional. Hal ini tentunya membuat *truster* dikalangan guru, siswa, orang tua siswa tidak lagi antusias untuk menyemarakkan kebijakan pemerintah, khususnya dalam bidang pendidikan.

Di sisi lain, elemen kultural dalam hal ini institusi budaya dan agama Hindu Bali juga cukup signifikan untuk mendorong gotong royong di sekolah. Institusi budaya dan agama konsisten untuk mendorong gotong royong baik di sekolah maupun di luar sekolah. Namun, dorongan gotong royong dari institusi agama dan budaya cenderung statis. Statis dikarenakan, kegiatan gotong royong hanya berkisar pada kegiatan ritual keagamaan semata, serta peringatan dalam siklus hidup bagi masyarakat Hindu Bali. Dalam penelitian ini memperlihatkan peran institusi agama-budaya di Bali cukup kuat untuk mendorong gotong royong sampai ke sekolah. Tentunya, jika melihat daerah lain tidak akan sekuat dengan di Bali dalam mendorong tindakan kolektif, karena nilai dan perangkat adat-agamanya berbeda.

Lebih jauh, gotong royong sebagai tindakan kolektif juga dapat dipelopori oleh actor yang aktif. Dalam kasus bank sampah diketahui kelapa sekolah memainkan peran sentral sebagai *trustee* untuk diberlakukannya sekolah yang berwawasan lingkungan. Konsistensi *trustee* dalam penelitian ini memperlihatkan sikap *truster* (guru, siswa, orang tua siswa, dan elemen warga sekolah lainnya) untuk mempercayakan sekolah memiliki wawasan lingkungan. Kemudian, sekolah sebagai lembaga menjadi trustee yang terus bekerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan sekolah yang berwawasan lingkungan. Tindakan kolektif yang didorong oleh trustee yang aktif, dalam hal ini pimpinan sekolah untuk mendorong tindakan kolektif ranah yang belum dimainkan oleh institusi-institusi besar seperti pemerintah dan juga agama-adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bowen, John R. *On the Political Construction of Tradition: Gotong Royong in Indonesia*, *The Journal of Asian Studies* (1986-1998); May 1986; 45, 3; Arts & Humanities Full Text.
- Cresswell, John W. 2003. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publication, Inc.
- Geertz, Hilderd and Clifford Geertz. 1975. *Kinship in Bali*. Chicago: University of Chicago Press.
- Howe, Leo. 2005. *The Changing World of Bali: Religion, Society and Tourism*. New York: Routledge.
- Koentjaraningrat. 1985. *Kebudayaan dan Mentalitas Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Kusumastuti, Ayu. 2015. "Modal Sosial dan Mekanisme Adaptasi Masyarakat Pedesaan dalam Pengelolaan dan Pembangunan Infrastruktur." *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 20 (1):81-97.
- Meighan, Roland, dkk. 1981. *A Sociology Of education*. Pitman Press: London
- Newberry, Jan. 2013. *Back Door Java; Negara, Rumah Tangga, dan Kampung di Keluarga Jawa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Pringle, Robert. 2004. *Short History of Bali: Indonesia Hindu Realm*. New Shouth Walles: Allen and Unwin.
- Setda. 2014. Launching Yoga Center SMP N 3 Denpasar. <http://setda.denpasarkota.go.id/index.php/baca-berita/6958/Launching-Yoga-Center-SMP-N-3-Denpasar>
- Sihombing, Antony, 2005. Understanding Community of Kampung By Learning From Gotong Royong and Conflict in Jakarta. *Jurnal Teknologi, Edisi No 1, tahun XIX Maret 2005*, 48-58, ISSN 0215-1685.
- Syahra, Rusydi, 2003. *Modal Sosial: Konsep Dan Aplikasi*. Dalam *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume 5 No. 1.
- Wati, Ni Nyoman. *Ngayah: Transformasi Nilai Sosial*. dalam *Jurnal Dewa Ruci Vol 5 No. 2* (2006). Diunduh dalam situs <http://jurnal.isi-ska.ac.id/index.php/dewaruci/article/view/797>